

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RAJABASA BARU
KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Tesis)

Oleh
FITRI WULANDARI
NPM 2220051007



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RAJABASA BARU
KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh

FITRI WULANDARI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Pada

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Oleh

Fitri Wulandari

Pembangunan infrastruktur di desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan di Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kuesioner berskala. Variabel penelitian meliputi pembangunan infrastruktur (X), dampak sosial (Y1), dampak ekonomi (Y2), dan keberlanjutan pembangunan (Z). Populasi berjumlah 2.455 jiwa, dengan 98 responden yang dipilih menggunakan non-probability purposive sampling, dan analisis data dilakukan dengan *Structural Equation Modeling* (SEM) SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak sosial yang cukup baik, di mana 9,18% responden menilai hasilnya belum optimal dan sebagian warga dusun pinggiran belum sepenuhnya merasakan manfaatnya. Namun, akses pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial meningkat. Secara ekonomi, biaya transportasi turun hingga 30%, usaha pertanian dan perdagangan meningkat, serta tercipta lapangan kerja sementara. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap dampak sosial dengan nilai *t-statistic* 7.948 dan *p-value* 0.000, dan koefisien 0.564. Pengaruh terhadap dampak ekonomi tidak signifikan dengan nilai *t-statistic* 0.934, *p-value* 0.350, dan koefisien 0.093. Dampak ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan dengan nilai *t-statistic* 9.221, *p-value* 0.000, dan koefisien 0.592. Pengaruh tidak langsung melalui dampak sosial tidak signifikan dengan nilai *t-statistic* 0.413, *p-value* 0.680, dan koefisien 0.042, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui dampak ekonomi signifikan dengan koefisien 0.313 dan *p-value* 0.000. Hasil ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan lebih banyak ditentukan oleh manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dibanding perubahan sosial yang terjadi.

Kata kunci: Dampak Ekonomi, Dampak Sosial, Desa Rajabasa Baru, Keberlanjutan Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur.

ABSTRACT

By

Fitri Wulandari

The development of infrastructure in villages plays a crucial role in improving the welfare of the community and achieving sustainable development. This study aims to analyze the impact of infrastructure development on social, economic, and sustainability impacts in Rajabasa Baru Village, Mataram Baru District, East Lampung Regency. The research uses a quantitative method with data collection techniques through observation, interviews, and scaled questionnaires. The research variables include infrastructure development (X), social impact (Y1), economic impact (Y2), and development sustainability (Z). The population consists of 2,455 individuals, with 98 respondents selected using non-probability purposive sampling, and data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) SmartPLS 4.0. The results of the study show that infrastructure development has a relatively good social impact, where 9.18% of respondents rated the results as not optimal, and some residents in the outskirts have not fully felt the benefits. However, access to education, health, and social participation have improved. Economically, transportation costs have decreased by up to 30%, agricultural and trade businesses have increased, and temporary employment opportunities have been created. Path analysis results indicate that infrastructure development has a positive and significant impact on social impact with a t-statistic value of 7.948 and a p-value of 0.000, and a coefficient of 0.564. The impact on economic outcomes is not significant with a t-statistic value of 0.934, a p-value of 0.350, and a coefficient of 0.093. The economic impact has a positive and significant effect on sustainability with a t-statistic value of 9.221, a p-value of 0.000, and a coefficient of 0.592. The indirect effect through social impact is not significant with a t-statistic value of 0.413, a p-value of 0.680, and a coefficient of 0.042, while the indirect effect through economic impact is significant with a coefficient of 0.313 and a p-value of 0.000. These findings confirm that the sustainability of development is more influenced by the economic benefits felt by the community than by the social changes that occur.

Keywords: *Economic Impact, Development Sustainability, Infrastructure Development, Rajabasa Baru Village, Social Impact.*

Judul Tesis

**: ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI
DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA RAJABASA
BARU KECAMATAN MATARAM BARU
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama

: Fitri Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa

2220051007

Program Studi

: Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas

: Pascasarjana Multidisiplin

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

Dr. Firda Sari, S.P., M.E.P.
NIP.197512242010122002

**2. Koordinator Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Lampung**

Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

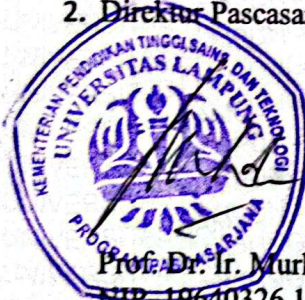
Ketua : Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.

Sekretaris : Dr. Firda Sari, S.P., M.E.P.

Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si.

Anggota : Dr. Serly Silviyanti S., S.P., M.Si.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 11 Desember 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA RAJABASA BARU KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR"** Adalah karya saya sendiri serta tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik ataupun yang biasa disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang akan diberikan kepada saya, serta bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Januari 2026

Penulis



Fitri Wulandari
NPM 2220051007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Rajabasa Baru pada tanggal 03 November 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Malik Nasikin dan Ibu Tri Murtini. Penulis menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Sadar Sriwijaya selesai pada tahun 2009, Madrasah Tsanawiyah Sriwijaya selesai pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribhawono selesai pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Lampung diterima tahun 2015 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selesai pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada program studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang telah mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil, terutama kepada kedua orang tua dan suami tercinta. Terimakasih atas segala dukungan dan doa yang tak pernah putus.

MOTTO

*“Tak Masalah Seberapa Sering Kau Jatuh,
Yang Terpenting Adalah Seberapa Cepat Kau Bangkit”*
- Arsene Wenger -

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Dampak Sosial Ekonomi Dan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur”**. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran dapat diberikan sebagai pembelajaran di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dan sebagai Dosen Pembimbing atas saran, waktu dan masukan yang diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si. dan Dr. Firda Sari, S.P., M.E.P. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan inspirasi, ilmu, waktu dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Ir. Sumaryo Gitosaputro, M.Si. dan Dr. Serly Silviyanti S., S.P., M.Si. sebagai Dosen Penguji atas saran, dan masukan yang diberikan untuk perbaikan tesis ini
6. Segenap dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Pascasarjana Universitas Lampung yang memberikan inspirasi, ilmu dan motivasi kepada penulis.

7. Keluarga penulis (Bapak Malik Nasikin dan Ibu Tri Murtini, serta adik-adik ku Septian dan Sandi) yang telah mendidik saya dan memberikan saya dukungan moril serta materil.
8. Suami tercinta Muhammad Irvan Ramadhan, ST. Yang telah sepenuh hati memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Ayah dan Ibu Mertua serta Abang, Kakak, dan Adik Ipar (Bapak Agus Supriyono dan Ibu Nirmawati, Abang Angga dan Kak Agnes, Abang Apin dan Kak Nia, dan Putri Aulia Azzahra) terimakasih sudah menemani penulis, memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan Angkatan 2022 di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung terutama Saskia, Syifa, Dzulfiana, Hidayatul, Renanda, dan Ataya terimakasih atas kebersamaan, semangat dan bantuan yang penulis dapatkan selama ini.
11. Teman-teman ku Asia, Cindy, Intan, terimakasih sudah selalu ada dan jadi teman yang seru buat diajak ngobrol dan bertukar pikiran.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kepada penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
 II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	 13
2.1. Tinjauan Pustaka	13
2.1.1. Pembangunan	13
2.1.2. Infrastruktur	15
2.1.3. Desa.....	16
2.1.4. Pembangunan Infrastruktur Desa.....	18
2.1.5. Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur Desa dengan Pembangunan Pertanian	20
2.1.6. Dampak Sosial.....	21
2.1.7. Tolak ukur dampak sosial	22
2.1.8. Latar Belakang Dampak Sosial	24
2.1.9. Dampak Ekonomi.....	24
2.1.10. Tolak ukur dampak ekonomi.....	25
2.1.11. Latar belakang dampak ekonomi.....	26
2.1.12. Pembangunan Berkelanjutan	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	27
2.3. Kerangka Berpikir	31
2.4. Hipotesis	35
 III. METODELOGI PENELITIAN.....	 36
3.1. Konsep Dasar dan Batasan Operasional	36
3.1.1. Variabel Independen (X).....	36
3.1.2. Variabel Dependen (Y)	37
3.1.3. Variabel Intervening (Penghubung)	38
3.2. Metode Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2.1. Sumber Data	39

3.2.2.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.3.	Skala Pengukuran.....	40
3.2.4.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3.	Teknik Sampling, Populasi, Responden.....	41
3.3.1.	Teknik Sampling.....	41
3.3.2.	Sampel	42
3.3.3.	Responden.....	42
3.4.	Metode Analisis Data	44
3.4.1.	Teknik Analisis Data.....	44
3.4.2.	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	44
3.4.3.	Struktural Model (<i>Inner Model</i>).....	45
3.4.4.	Model Diagram Jalur.....	46
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	49
4.1.	Gambaran Umum Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur	49
4.2.	Gambaran Umum Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur	51
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1.	Karakteristik Responden Penelitian	55
5.2.	Deskripsi Variabel penelitian	65
5.2.1.	Variabel Independen (X)	65
5.2.2.	Variabel Dependen Dampak Sosial (Y1).....	78
5.2.3.	Variabel Dependen Dampak Ekonomi (Y2).....	95
5.2.4.	Variabel Keberlanjutan Pembangunan (Z)	97
5.3.	Analisis Jalur Partial Least Square (PLS)	99
5.3.1.	Outer Model.....	99
5.3.2.	Uji Reliabilitas	101
5.4.	Evaluasi Model Struktural (Inner Model)	102
5.5.	Pengujian Hipotesis	103
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	130
6.1.	Kesimpulan.....	130
6.2.	Saran	131
	DAFTAR PUSTAKA.....	133
	LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis pembangunan infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022	6
2. Pendapatan Per Kapita masyarakat Desa Rajabasa Baru 2018-2022.....	7
3. Indikator Dampak Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasabaru Tahun 2022	8
4. Penelitian terdahulu.....	28
5. Kutipan variabel	32
6. Definisi variabel independen dan indikator variabel X.....	36
7. definisi variabel dependen dan indikator variabel	38
8. Definisi variabel intervening dan indikator variabel.....	38
9. Kriteria <i>skala likert</i>	40
10. Jumlah penduduk berdasarkan dusun	42
11. Jumlah responden.....	43
12. Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin	56
13. Jumlah responden berdasarkan status dalam rumah tangga.....	57
14. Sebaran responden berdasarkan usia.....	58
15. sebaran responden berdasarkan status kependudukan	59
16. Sebaran responden berdasarkan lama tinggal	60
17. Jumlah informan menurut pendidikan terakhir	61
18. Sebaran responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga	62
19. Sebaran responden berdasarkan jenis pekerjaan	63
20. Sebaran responden berdasarkan pekerjaan samping	64
21. Sebaran responden berdasarkan penetrasi jalan	65
22. Cakupan pembangunan jalan desa	66
23. Kemudahan akses antar dusun akibat pembangunan jalan	68

24. Sebaran responden berdasarkan penetrasi jalan dengan latston.....	70
25. Peningkatan kualitas jalan desa melalui pengerasan.....	71
26. Ketahanan jalan desa setelah pengerasan dengan lataston.....	73
27. Pembangunan Drainase	74
28. Sebaran persepsi masyarakat terhadap kondisi pembangunan tanggul penahan tanah.....	76
29. Sebaran responden berdasarkan penilaian responden terhadap pembangunan jalan Telford	77
30. Sebaran responden berdasarkan variabel dampak sosial	78
31. Sebaran responden mengenai pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap partisipasi sosial warga.....	80
32. Sebaran responden mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan desa pasca pembangunan infrastruktur	82
33. Sebaran responden mengenai pembangunan infrastruktur dan penguatan tradisi lokal desa.....	84
34. Sebaran responden mengenai penguatan norma sosial dan aturan desa melalui pembangunan infrastruktur	85
35. Sebaran responden mengenai pembangunan infrastruktur dan penguatan budaya lokal desa	87
36. Sebaran jawaban responden mengenai persepsi masyarakat terhadap dampak pembangunan infrastruktur	89
37. Sebaran responden mengenai peningkatan kesejahteraan sosial melalui pembangunan infrastruktur	90
38. Sebaran responden mengenai penyediaan alat pertanian dan sarana kesehatan, jalan, dan jembatan	92
39. Sebaran jawaban responden mengenai meminimalisir konflik, meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan memperkuat interaksi sosial	94
40. Sebaran responden berdasarkan variabel dampak ekonomi.....	95
41. Sebaran responden berdasarkan variabel keberlanjutan	97
42. Nilai loading factor	99

43. Discriminant validity <i>fonnell-lacker</i>	100
44 Diskriminant validity <i>heteroitrai monotrait</i>	100
45. <i>Construct reability</i>	101
46. <i>Output Collinearity Statistik (VIF) Inner Model - Matrix</i>	102
47. Nilai <i>R-square</i> masing-masing variabel dependen penelitian	103
48. Nilai koefisien jalur dan signifikansi masing-masing variabe	105
49. Nilai signifikansi dan koefisien jalur variabel X.....	108
50. Nilai signifikansi dan koefisien jalur variabel X.....	111
51. Nilai signifikansi dan koefisien jalur variabel dampak sosial dan dampak ekonomi terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur.	113
52. Hasil Uji <i>P-Value</i>	116
53. Pengujian hipotesis (pengaruh langsung)	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka berfikir dampak dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa	34
2. Model diagram jalur antar variabel	47
3. Peta administrasi Kecamatan Mataram Baru	50
4. Peta Administrasi Desa Rajabasa Baru	54
5. Bagan struktur jalur penelitian	106
6. Model struktur uji 1	107
7. Model struktur uji 2	109
8. Model struktur uji 3	112
9. Hasil model penelitian	128
10. Kegiatan pembangunan jalan	161
11. Kegiatan pembangunan drainase dan tanggil penahan tanah.....	161

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Identitas Responden	141
2. Rekap kuisioner variabel X	147
3. Rekap kuisioner Variabel Y1	150
4. Rekap kuisioner Variabel Y2	155
5. Rekap kuisioner Variabel Z	158
6. Foto Kegiatan Pembangunan	161

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur publik di suatu negara berperan penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menciptakan lingkungan yang kompetitif. Selain itu, infrastruktur publik memberikan kontribusi pada masa depan yang lebih baik dengan meningkatkan konektivitas masyarakat terhadap berbagai kesempatan yang tersedia. Infrastruktur publik mencakup struktur, sistem, dan fasilitas yang mendukung ekonomi bisnis, industri, negara, kota, atau wilayah, termasuk layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran aktivitas perekonomian (Amalia, 2021). Perencanaan pembangunan mencakup berbagai aspek di dalamnya seperti pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan fisik atau infrastruktur. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan fisik di daerahnya.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan fisik bagi pemerintah daerah juga diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan suatu

lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang hirarkinya berada di bawah daerah atau kabupaten desa diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakatnya. Otoritas desa berasal dari prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam masalah pembangunan infrastruktur namun masih tetap dalam acuan peraturan yang ada pada tingkat kabupaten.

Kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus pembangunan desanya juga diperkuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa kewenangan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, dengan demikian desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur adalah salah satu elemen penting yang harus disediakan oleh pemerintah desa. Infrastruktur merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang harus dipenuhi untuk menunjang aktivitas masyarakat, baik aktivitas sosial maupun ekonomi. Grigg dalam Sriwati (2024) berpendapat bahwa infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Infrastruktur yang ada di pedesaan yaitu infrastruktur jalan, saluran irigasi, drainase, dan jaringan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan pembangunan fisik yang memegang peran penting terhadap kesejahteraan dan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat desa. Pembangunan infrastruktur di desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan konektivitas, dan mendukung kegiatan ekonomi lokal. Lebih lanjut, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang memberikan akses kepada transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang esensial untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik merujuk pada pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau dapat terlihat dengan mata seperti infrastruktur, pembangunan bangunan, fasilitas umum, dan elemen fisik lainnya (Khanifah, 2022). Setiap negara berusaha untuk melaksanakan pembangunan dengan tujuan agar semua orang dapat berpartisipasi.

Kemajuan ekonomi merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan, meskipun bukan satu-satunya. Ini karena pembangunan tidak hanya merupakan fenomena ekonomi. Secara mendasar, pembangunan harus mencakup aspek materi dan finansial dalam kehidupan. Pembangunan adalah

proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem ekonomi dan sosial (Amalia, 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur menjadi aset yang sangat esensial bagi masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan di berbagai sektor.

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang ditetapkan menjadi daerah otonom baru pada tahun 1999 dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Timur sudah banyak melakukan pembangunan dan perkembangan yang pesat, yang hingga saat ini terdapat 24 Kecamatan definitif dan 264 desa definitif.

Berdasarkan amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan telah menetapkan RPJP Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005- 2025, pembangunan di Kabupaten Lampung Timur diuraikan dalam RPJMD yang dibagi dalam empat tahap yaitu tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), Tahap IV (2021-2025). Hal ini didukung dengan visi daerah “Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan”. Salah satu wilayah di Lampung Timur yang menjadi fokus pembangunan adalah Kecamatan Mataram Baru.

Kecamatan Mataram Baru terdiri dari tujuh desa dengan luas wilayah 7.956,11 hektar, berdasarkan kebijakan kewilayahan dan hasil telaah struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 dalam pasal 9 ayat 5 butir O, kecamatan ini difungsikan sebagai kawasan permukiman, pengembangan infrastruktur, pertanian unggulan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Timur tahun 2021- 2026, pemanfaatan ruang Kecamatan Mataram Baru diperuntukan sebagai kawasan pengembangan infrastruktur. RPJM Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2026 kemudian

disederhanakan dalam waktu lebih pendek yaitu satu tahun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tahun 2022 bahwa Kecamatan Mataram Baru diperuntukan sebagai kawasan pemukiman, pertanian, kawasan lindung dan pariwisata. Desa Rajabasa Baru sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Mataram Baru dengan luas lahan sebesar 800 hektar yang diperuntukan sebagai kawasan pemukiman untuk masyarakatnya yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Untuk itu dibutuhkan sarana infrastruktur penunjang yang memadai untuk membantu mobilitas masyarakat dan mendorong pergerakan ekonomi baik dari hulu sampai hilir.

Program pembangunan infrastruktur yang telah diselesaikan oleh pemerintah Desa Rajabasa Baru didasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019-2025. Pembangunan ini kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022 dan dibiayai oleh Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa yang digunakan untuk program pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru yang tertulis dalam RKP Tahun 2022 adalah seperti Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022

No	Jenis Pembangunan	Luas (M)	Lokasi
1	Penetrasi jalan desa	1.000	Dusun I
2	Penetrasi jalan desa	1.000	Dusun II
3	Pengerasan jalan dengan lataston	2 000	Dusun IV
4	Pembangunan drainase	1.600	Dusun IV
5	Pembangunan tanggul penahan tanah	50	Dusun I
6	Pembangunan jalan telford	1.500	Dusun VII

Sumber: Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa Rajabasa Baru Tahun 2022

Pembangunan infrastruktur tersebut masih terdapat kendala diantaranya yaitu keterbatasan anggaran karena dengan anggaran yang terbatas dan penggunaan anggaran tersebut tidak hanya diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur saja melainkan juga untuk bidang lain yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, kurangnya sumber daya manusia untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan tidak adanya keberlanjutan pembangunan sarana prasarana.

Pembangunan infrastruktur memerlukan anggaran yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan yang sudah direncanakan, namun dalam kenyataannya anggaran desa yang diperoleh masih terbatas sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah disusun dalam RPJMDes masih kurang maksimal. Menurut Simanjuntak (2024), pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek diantaranya yaitu dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah karena konektivitas sehingga dapat terjalin interaksi yang baik antar masyarakat, mendukung kelancaran pergerakan ekonomi antar wilayah, dan dapat mempermudah masuknya teknologi baru untuk kemudahan transfer informasi antar wilayah.

Penelitian ini menjadikan dampak sosial dan ekonomi sebagai faktor utama yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan pembangunan infrastruktur

desa. Dari segi sosial, peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Infrastruktur yang baik juga meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperbaiki konektivitas antar wilayah. Dari segi ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan efisiensi bisnis, dan menarik investasi baru. Ini juga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memungkinkan diversifikasi ekonomi (World Bank, 1994). Dana desa memiliki manfaat yang lebih luas dari sekadar pembangunan infrastruktur. Selain untuk pembangunan fisik, dana desa juga dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas layanan publik. Misalnya, dana desa dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, atau program kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan dampak positif dana desa dapat lebih berkesinambungan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Pendapatan Per Kapita Masyarakat Desa Rajabasa Baru 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pendapatan Per Kapita Masyarakat Desa Rajabasa Baru 2018-2022

Tahun	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2018	15.500.000
2019	16.200.000
2020	15.800.000
2021	16.500.000
2022	17.200.000

Sumber: Data Desa Rajabasa Baru, 2023

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa pendapatan per kapita masyarakat Desa Rajabasa Baru mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun, peningkatan ini relatif kecil dan belum

mencerminkan dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan. Dalam menganalisis dampak pembangunan infrastruktur, penting untuk membedakan antara dampak langsung (*outcome*) dan dampak tidak langsung (*impact*). Dampak langsung dapat berupa peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas publik, sedangkan dampak tidak langsung mencakup peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Indikator dampak pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator Dampak Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022

Indikator	Sebelum Pembangunan	Setelah Pembangunan
Waktu tempuh ke pusat desa (menit)	30 menit	20 menit
Biaya transportasi (Rp/km)	Rp. 5.000/Km	Rp. 3.500/Km
Jumlah UMKM tingkat partisipasi sekolah (%)	25%	32%
Kunjungan ke fasilitas kesehatan	150/bulan	200/bulan

Sumber: Profil Desa Rajabasa Baru, 2024

Data di atas menunjukkan adanya perubahan positif dalam beberapa indikator setelah pembangunan infrastruktur. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya mencerminkan transformasi signifikan dalam kehidupan masyarakat, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas dampak pembangunan. Fokus penelitian pada pembangunan infrastruktur tahun 2022 didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, tahun 2022 merupakan tahun terakhir dengan data lengkap yang tersedia saat penelitian ini dimulai. Kedua, pada tahun tersebut, terdapat alokasi dana desa yang cukup signifikan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga memungkinkan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif. Ketiga, dengan memfokuskan pada satu tahun anggaran, penelitian dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan spesifik tentang efektivitas dan dampak program pembangunan dalam jangka pendek.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Karin Zahra dkk. (2024), pembangunan jalan raya memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Medan Tembung. Pembangunan infrastruktur jalan membuka peluang baru bagi masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam konteks pengembangan wilayah. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Afriyana dkk. (2023) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa infrastruktur listrik dan air berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, responden juga menemukan bahwa infrastruktur jalan dan pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif. Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pembangunan infrastruktur dalam konteks yang berbeda dan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lokal dalam perencanaan pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Zahra *et al.* (2024) di Kecamatan Medan Tembung menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan raya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka peluang baru yang mendukung aktivitas ekonomi. Sementara itu, Afriyana *et al.* (2023) menganalisis dampak berbagai jenis infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menemukan bahwa infrastruktur listrik dan air berpengaruh positif signifikan, sedangkan infrastruktur pasar berpengaruh negatif signifikan. Namun, kedua penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif aspek keberlanjutan dan dampak sosial dari pembangunan infrastruktur, terutama dalam konteks desa. Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik wilayah yang dapat

mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi serta aspek keberlanjutan dari pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Dengan mempertimbangkan karakteristik lokal dan fokus pada keberlanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dan implikasi jangka panjang dari pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya merangsang keberlanjutan fisik infrastruktur, tetapi juga membentuk dasar untuk keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Rajabasa Baru.

1.2. Rumusan Masalah

Desa Rajabasa Baru berada di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari tujuh dusun. Pembangunan infrastruktur sudah banyak dilakukan oleh pemerintah desa Rajabasa Baru, antara lain penetrasi jalan desa, pengerasan jalan dengan laston, pembangunan drainase, pembangunan tanggul penahan tanah dan pembangunan jalan telford. Idealnya pembangunan infrastruktur memiliki dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Dampak positif dari pembangunan infrastruktur terhadap kondisi sosial adalah meningkatnya frekuensi interaksi masyarakat lebih sering dan erat, mempermudah mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Dampak ekonomi pembangunan infrastruktur dimulai dari infrastruktur dapat menstimulasi aktivitas ekonomi dan pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru. (Afriyana, 2023).

Pembangunan infrastruktur pedesaan yang telah dilakukan dan melalui serangkaian tahapan penyusunan dan melibatkan masyarakat di dalamnya, bertujuan agar hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan dampak positifnya baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Namun, kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru menunjukkan bahwa,

secara umum dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan. Meskipun pemerintah desa telah menjalankan tugasnya dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen perencanaan, dampak positif serta kelangsungan pembangunan tersebut masih kurang diperhitungkan. Dengan kata lain, meskipun proses pembangunan sudah berjalan sesuai rencana, manfaat jangka panjang dan kesinambungannya masih memerlukan perhatian lebih. Adanya perbedaan kondisi ideal dampak pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan dampak positif dari segi sosial maupun ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dengan kondisi sebenarnya yang ada di Desa Rajabasa Baru yang mana dampak pembangunan yang tidak dirasakan dampak positifnya, maka hal tersebut yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur desa terhadap kondisi sosial masyarakat ?
2. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur desa terhadap kondisi ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana variabel pembangunan infrastruktur desa berpengaruh langsung terhadap dampak sosial dan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru?
4. Bagaimana variabel pembangunan infrastruktur desa tidak berpengaruh langsung terhadap dampak sosial dan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dampak sosial dari pembangunan infrastruktur desa.
2. Mengetahui dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur desa.

3. Menganalisis variabel Pembangunan Infrastruktur Desa berpengaruh langsung terhadap Dampak sosial dan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru
4. Menganalisis variabel Pembangunan Infrastruktur Desa tidak berpengaruh langsung terhadap Dampak sosial dan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif dan relevan dalam berbagai aspek baik bagi akademis maupun praktisi. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan masukan dan informasi dasar bagi Pemerintah Desa Rajabasa Baru serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif dalam bidang sosial maupun ekonomi.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk penelitian selanjutnya pada topik bahasan yang sama.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pembangunan

Siagian dalam Mantriri (2023) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, bahwa pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.

Pembangunan adalah proses transformasi yang melibatkan berbagai aspek sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan juga harus memperhatikan kesejahteraan manusia, kebebasan individu, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan. Secara umum, terdapat kesepakatan bahwa pembangunan adalah proses untuk menghasilkan perubahan (Fatimah, 2022). Pada dasarnya, pembangunan merupakan suatu perubahan masyarakat dari satu keadaan menuju keadaan lain yang semakin mendekati visi ideal masyarakat. Dalam proses perubahan tersebut, dua aspek yang harus diperhatikan adalah kelangsungan (*continuity*) dan transformasi (*change*). Interaksi antara kedua aspek tersebut menciptakan dinamika dalam pertumbuhan yang ada di masyarakat. Wrihatnolo dan Dwijiwinoto dalam

Zulfan (2022) mengemukakan bahwa konsep pembangunan memiliki tahapan-tahapan yaitu:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan
6. Pemberdayaan

Tahapan pembangunan merupakan realitas fisik dan tekad suatu masyarakat untuk secara maksimal berusaha melalui serangkaian gabungan proses sosial, ekonomi, dan institusional dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya pembangunan harus memiliki tiga target utama, sebagaimana dijelaskan oleh Todaro dalam Karim (2023) yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan meluaskan distribusi berbagai jenis barang kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keamanan.
2. Peningkatan kualitas hidup yang tidak hanya mencakup peningkatan pendapatan tetapi juga termasuk peningkatan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Semua ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga untuk memperkuat identitas individu dan bangsa yang bersangkutan.
3. Pengembangan opsi ekonomis dan sosial untuk setiap individu dan seluruh bangsa, dilakukan dengan membebaskan responden dari ketergantungan dan sikap yang bersifat submisif, tidak hanya terhadap individu atau negara lain, tetapi juga terhadap segala kekuatan yang dapat mengurangi nilai-nilai kemanusiaan responden. Tujuan pembangunan itu sendiri secara garis besar adalah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, maju, mandiri dan sejahtera (UUD NKRI, 1945).

2.1.2. Infrastruktur

Menurut Grigg dalam Muslim (2023) menjelaskan definisi infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhandasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur publik berperan penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah. Infrastruktur menjadi sarana vital yang menghubungkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa. Infrastruktur mencakup fasilitas fisik yang dibangun atau diperlukan oleh agen publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan, seperti penyediaan air, energi listrik, pengelolaan limbah, transportasi, dan layanan lainnya, yang bertujuan untuk mendukung aspek ekonomi dan sosial (Frita, 2022).

Secara teknik, infrastruktur dapat dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang secara sistematis untuk memberikan pelayanan publik. Dengan demikian, infrastruktur terdiri dari berbagai bagian, termasuk sarana dan prasarana (jaringan) yang saling terkait dan didefinisikan sebagai suatu sistem. Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur diartikan sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakatserta mendukung jaringan struktur guna memastikan kelangsungan pertumbuhanekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, jenis-jenis infrastruktur meliputi: Transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah terpusat, sistem pengelolaan air limbah setempat, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, infrastruktur ketenagalistrikan, minyak dan gasbumi dan energi terbarukan, konservasi energi, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, sarana prasarana olahraga dan seni, infrastruktur kawasan, pariwisata, Kesehatan, Lembaga pemasyarakatan, dan penyediaan perumahan.

2.1.3. Desa

Secara etimologis, istilah desa berasal dari kata "swadesi," yang mengacu pada suatu tempat, lingkungan, atau unsur yang netral dan otonom. Dalam bahasa Sansekerta, desa diartikan sebagai tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang terdiri dari beberapa rumah tangga dan memiliki struktur pemerintahan dengan 21 perangkat (yang dipimpin oleh seorang kepala desa), atau desa dapat juga merujuk pada kumpulan rumah-rumah di luar kota metropolitan yang membentuk suatu kesatuan (Puluhulawa, 2021).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, serta berada di wilayah kabupaten. Sebagai entitas pemerintahan, desa memiliki fungsi yang sama dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, desa dilengkapi dengan berbagai peraturan sebagai pedoman untuk mengelola urusan pemerintahan. Selain itu, desa juga menerima pendanaan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber-sumber lainnya (Mawarni, 2023).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa terbentuk dari inisiatif beberapa kepala keluarga yang tinggal secara permanen, mencerminkan akar lokal meliputi bahasa, tradisi, ekonomi, dan kondisi sosial-budaya masyarakat sekitarnya. Desa merupakan unit administratif di bawah kabupaten/kota, kemudian undang-undang tersebut disempurnakan oleh undang-undang terbaru yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat tentang Desa (1) adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus pemerintahannya sendiri. Kesatuan masyarakat ini juga berwenang mengatur kepentingan warga setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul yang diakui oleh pemerintah pusat. Dari beberapa pengertian desa di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan hasil gabungan antara aktivitas sekelompok masyarakat dan lingkungannya, yang melibatkan unsur-unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Untuk aspek sosial, hubungan antar penduduk di desa cenderung erat. Dari segi ekonomi, desa diidentifikasi sebagai wilayah yang pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian.

Dalam perspektif politik, desa dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur kehidupannya sendiri, yang telah dimilikinya sejak terbentuknya kesatuan masyarakat hukum tanpa diberikan oleh pihak eksternal. Hal ini yang membedakan desa dengan daerah otonom, yang otonominya diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional (Leimeheriwa, 2020). Desa berdasarkan Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Desa mandiri, yang juga dikenal sebagai desa sembada, merujuk pada desa yang berkembang dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa seoptimal mungkin, yang dilandasi oleh ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.
2. Desa maju, atau disebut juga sebagai desa pra sembada, merupakan desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang potensial, serta mampu mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan.
3. Desa berkembang, atau dikenal sebagai desa madya, adalah desa yang memiliki potensi untuk menjadi maju, dengan sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang berpotensi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan mengatasi kemiskinan.

4. Desa tertinggal, atau disebut juga sebagai desa pra-madya, merujuk pada desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang optimal dalam pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan mengatasi berbagai bentuk kemiskinan.
5. Desa yang sangat tertinggal, atau yang dikenal sebagai desa pratama, menghadapi kerentanan akibat bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola secara efektif potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, dan mengalami berbagai bentuk kemiskinan.

Kategori kategori-kategori tersebut mencerminkan tingkat kematangan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam mengelolapotensi dan meningkatkan kualitas hidup responden.

2.1.4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Asnudin Andi dalam Rodhi (2023) mendefinisikan infrastruktur perdesaan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Perencanaan Pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu perencanaan selama enam tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk kurun waktu satu tahun.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 80 ayat 3, bahwa dalam perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan,
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur akan meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas proyek pembangunan. Pembangunan pedesaan yang berarti memprioritaskan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan (Istiqomah, 2024).

Pendapat para ahli di atas tentang pembangunan infrastruktur desa dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang efektif memerlukan pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan tata kelola yang baik dan pemberdayaan masyarakat desa agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur desa, terutama Dana Desa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah "alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara", yang kemudian dikenal sebagai Dana Desa. Dana Desa ini merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang

diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Tujuan utama Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur desa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan adanya Dana Desa, pemerintah desa memiliki sumber daya finansial yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

2.1.5. Keterkaitan Pembangunan Infrastruktur Desa dengan Pembangunan Pertanian

Pembangunan infrastruktur desa memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian sebagai sumber mata pencaharian terbesar yang ada di wilayah pedesaan. Keterkaitan antara pembangunan infrastruktur desa dengan pembangunan pertanian dapat dijelaskan melalui teori pembangunan pertanian dari Arthur Theodore Mosher (Yusliana, 2020). Dalam teorinya, Mosher mengemukakan lima syarat pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, yaitu: pasar, teknologi, sarana produksi, perangsang produksi, dan transportasi.

Syarat pokok tersebut akan terpenuhi apabila disertai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan produksi dan irigasi pertanian. Hal ini terbukti dalam studi Yusliana (2020) yang menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa mampu meningkatkan produktivitas petani di wilayah Polanharjo. Kondisi pembangunan pertanian yang disertai dengan pembangunan infrastruktur desa manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat menurut Saragih, dalam Afriyana (2023) diantaranya yaitu:

1. Pasar yang mendukung: Infrastruktur desa yang memadai akan menciptakan akses yang lebih baik bagi petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan jaringan jalan yang baik dan fasilitas penunjang lainnya, petani dapat menjual hasil panennya dengan mudah, sehingga mempercepat siklus ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Tersedianya teknologi yang sesuai: Pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penunjang lainnya akan mempermudah akses petani terhadap teknologi pertanian, baik itu alat pertanian modern maupun informasi teknis. Infrastruktur yang memadai memungkinkan distribusi teknologi ke daerah-daerah pertanian secara lebih efektif.
3. Tersedianya sarana produksi: Infrastruktur yang baik mendukung penyediaan sarana produksi seperti pupuk, benih, dan alat-alat pertanian. Dengan akses yang lebih mudah dan lancar, petani bisa mendapatkan sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau dan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga proses produksi dapat berjalan optimal.
4. Motivasi untuk berproduksi: Dengan adanya infrastruktur yang memadai, petani akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Infrastruktur yang baik tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga memberikan keyakinan kepada petani bahwa usaha responden dapat berkelanjutan dan menguntungkan.
5. Perbaikan fasilitas pengangkutan dan distribusi: Jaringan jalan dan transportasi yang baik mempermudah petani dalam mendistribusikan hasil panen ke pasar. Hal ini akan meningkatkan akses pasar, mengurangi biaya transportasi, dan mencegah kerugian akibat keterlambatan distribusi. Menurut Mosher, akses transportasi yang baik sangat krusial untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

2.1.6. Dampak Sosial

Fardani dalam Pangestu (2022) menjelaskan bahwa dampak sosial dapat diartikan sebagai hasil atau pengaruh yang timbul akibat dari suatu kejadian atau hal tertentu. Pengaruh tersebut merujuk pada konsekuensi yang masyarakat alami, baik itu disebabkan oleh peristiwa tertentu atau hal lain yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam Seswandi (2024), yang mengacu pada pandangan Gillin dan Gillin, perubahan sosial diartikan sebagai variasi dari pola hidup yang telah ada dan diterima dalam suatu masyarakat. Variasi tersebut dapat timbul akibat

perubahan kondisi geografis, perubahan dalam kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, serta karena adanya difusi atau penemuan teknologi baru di dalam masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat mengadopsi atau menerapkan suatu variasi atau cara baru dalam pola hidup yang sudah ada, maka hal tersebut dapat disebut sebagai perubahan sosial.

Dampak sosial seperti yang dijelaskan oleh Sudharto dalam Wantari (2022) adalah perubahan yang terjadi pada individu dan masyarakat akibat dari kegiatan pembangunan, Dampak ini timbul ketika suatu masyarakat mengalami intervensi dalam bentuk proyek, program, atau kebijakan tertentu. Intervensi tersebut dapat memengaruhi keseimbangan dalam sistem masyarakat, yang bisa bersifat positif maupun negatif. Dampak perubahan sosial menurut Sidik (2020) diartikan sebagai perubahan peradaban manusia sebagai hasil dari transformasi alam, biologis, dan perubahan fisik yang terjadi sepanjang perjalanan hidup manusia. Perubahan sosial melibatkan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang berdampak pada sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

2.1.7. Tolak ukur dampak sosial

Determinan perubahan sosial dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kepemilikan kekayaan, dan jenis pekerjaan. Dampak sosial yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Terdapat empat tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi.

2. Norma

Norma menurut Suratno (2023) adalah aturan, standar, ukuran yang tidak tertulis namun ditaati oleh masyarakat. Norma merupakan sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu.

Norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum atau yang disebut sebagai norma umum.

3. Konflik

Putra (2023) mendefinisikan konflik sebagai benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam.

4. Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dalam konteks dampak pembangunan infrastruktur, perubahan budaya dapat diamati melalui pergeseran pola hidup, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

5. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah proses dimana individu-individu dalam suatu komunitas mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera responden agar memberi makna kepada lingkungan responden. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, persepsi masyarakat mencakup bagaimana masyarakat memandang, memahami, dan menilai proses pembangunan serta dampaknya terhadap kehidupan responden. Persepsi ini dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap proyek pembangunan infrastruktur.

2.1.8. Latar Belakang Dampak Sosial

Claudea (2024) berpendapat perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam elemen-elemen yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat, seperti perubahan ekonomi, kebudayaan, teknologi, politik, geografis, dan lainnya. Keseluruhannya menunjukkan bahwa perubahan adalah serangkaian peristiwa yang saling terkait dan membentuk lingkaran tanpa putus. Pengembangan perlu dipahami sebagai suatu proses yang memiliki banyak dimensi, melibatkan perubahan signifikan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional. Ini mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan upaya pemberantasan kemiskinan mutlak (Widani, 2022).

2.1.9. Dampak Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan inisiatif masyarakat untuk memajukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitasnya (Sakti, 2020). Sadono Sukimo dalam Tumewu (2022) menyatakan bahwa perubahan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Untuk menilainya, perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahun, yang dikenal sebagai laju pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan. Sinaga (2004) menegaskan bahwa dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif, sehingga penilaian dapat lebih seimbang.

Dampak terhadap ekonomi secara umum dapat dianggap positif jika terdapat perbaikan dalam beberapa aspek, seperti: meningkatnya penerimaan devisa, meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya peluang pekerjaan, harga dan tarif di suatu wilayah relatif stabil, distribusi manfaat dan keuntungan secara merata, kepemilikan dan pengendalian, pembangunan, serta pendapatan pemerintah (Sartika, 2024).

2.1.10. Tolak ukur dampak ekonomi

Tolok ukur keberhasilan pembangunan terhadap dampak ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor.

Dampak ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan masyarakat

Reksoprayitno dalam Rahayu (2021) menjelaskan pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Peluang kerja

Tambunan (2023) mendefinisikan peluang kerja sebagai banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia jika lapangan pekerjaan yang ada mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Dengan kata lain, kesempatan kerja disini tidak menunjukkan pada potensi tetapi pada fakta jumlah orang yang bekerja.

3. Harga atau tarif

Definisi harga atau tarif menurut Kotler dalam Kurniawati (2023) adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang dan jasa.

4. Kepemilikan

Mun'im (2024) menjelaskan kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan kebebasan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya.

2.1.11. Latar belakang dampak ekonomi

Ismunandar (2020) menyatakan bahwa transformasi masyarakat, yang terjadi akibat perubahan pola perekonomian, bersifat kumulatif dan bahkan permanen. Ini terjadi ketika masyarakat berhasil mengendalikan sumber daya produksi, termasuk kepemilikan lahan. Harsono (2021) menambahkan bahwa perubahan ekonomi tidak hanya terkait dengan penyebaran teknologi, rasionalisasi pasar, atau penetrasi kapitalis, tetapi juga mencakup aspek komunitas, moralitas, dan kekuasaan. Selain itu pendidikan dianggap sebagai bagian integral dari kondisisosial ekonomi. Pendidikan, sebagai unsur sosial budaya, turut berperan dalam memengaruhi perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

2.1.12. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah strategi pembangunan di mana pemanfaatanSDA dan SDM, potensi investasi, perkembangan IT dan transformasi kelembagaan yang disebut sebagai Environmental Sound and Sustainable Development atau Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan (PBBL). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan dengan tujuan menciptakan fasilitas fisik. Fasilitas tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai aspek, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Fitriandari, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan. Hal ini dilakukan untuk menjamin integritas lingkungan hidup dan kesejahteraan generasi masa kini dan masa depan.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Perencanaan pembangunan di Indonesia untuk periode mendatang tengah difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam upaya ini, timbul berbagai isu terkait operasional jaringan, aspek ekonomi, dan dampak lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan mendasarkan diri pada prinsip keseimbangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur saat ini dengan kebutuhan masa depan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tiga aspek penting yang harus diperhatikan dan diintegrasikan, yaitu keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Rahman, 2023).

2.2. Penelitian Terdahulu

Data pendukung dalam sebuah penelitian sangatlah penting untuk dijadikan referensi pada teori atau temuan dari penelitian sebelumnya menjadi dasar acuan yang relevan. Kajian terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
1	Satria & Aldi (2023)	Analisis Keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata	Mengetahui integrasi aspek ekonomi lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata	Kualitatif, wawancara mendalam	Integrasi aspek ekonomi lingkungan berperan krusial dalam keberlanjutan
2	Hairunnisa & Syaka (2022)	Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Mendeskripsikan upaya percepatan pembangunan IKN melalui perspektif komunikasi politik	Analisis deskriptif	Strategi komunikasi politik diperlukan untuk optimalisasi pembangunan IKN
3	Purwitasari et al. (2024)	Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Mengevaluasi urgensi pajak dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi	Kajian literatur	Pajak berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur yang berdampak positif pada ekonomi
4	Putri & Putri (2020)	Analisis Pembiayaan Non-Anggaran Pemerintah Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Indonesia	Menganalisis peluang skema pembiayaan infrastruktur non-anggaran pemerintah yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia	Metode skoring, wawancara	Empat skema berpotensi dikembangkan: konsolidasi lahan, pinjaman daerah, obligasi, dan KPBU
5	Kustiawan et al. (2023)	Dampak Positif & Negatif Pembangunan Infrastruktur Nasional di Era Digital	Memahami pentingnya komunikasi pembangunan melalui TIK dalam era globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi	Kualitatif studi kasus	Komunikasi pembangunan melalui TIK meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
6	Aulia et al. (2024)	Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang	Menganalisis peran infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kota Palembang	Studi literatur, analisis data sekunder	Infrastruktur berperan signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
7	Hulu & Wahyuni (2021)	Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019	Menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, serta pengaruh infrastruktur dan determinan lainnya	Analisis Simultan	Terdapat hubungan simultan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan; infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
8	Fauziah. N., dan Nasdian, T.F., (2021)	Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat Dengan Pemanfaatan Digital Pada Desa Wisata (Kasus: Desa Wisata Jelok, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Studi partisipasi masyarakat dan pemanfaatan digital di desa wisata	Kombinasi studi kasus dan metode survei	Tingkat partisipasi insentif-fungsional tidak terkait erat dengan pemanfaatan digital; anggota Pokdarwis berkontribusi lebih banyak dibandingkan penduduk setempat.

Kajian penelitian terdahulu memberikan berbagai kontribusi terhadap penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penelitian baru dapat dibangun di atas temuan studi sebelumnya dengan memeriksa manfaat sosial ekonomi spesifik yang diperoleh dari proyek pembangunan infrastruktur desa, seperti peningkatan peluang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.
2. Dapat memperluas penelitian yang ada dengan mengeksplorasi interaksi antara pembangunan infrastruktur desa dan tingkat kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kemiskinan untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dampak sosial ekonomi.
3. Penelitian baru dapat berkontribusi dengan menyelidiki peran kemitraan publik-swasta dalam memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur desa dan manfaat sosial ekonomi jangka panjangnya bagi masyarakat.

Kontribusi kajian penelitian terdahulu membawa perbedaan yang menjadi sebuah kebaruan yang ada dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Kurangnya studi yang berfokus pada dampak sosial ekonomi jangka panjang dari proyek pembangunan infrastruktur desa, terutama dalam menghasilkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji sejauh mana infrastruktur dapat meningkatkan dampak ekonomi masyarakat Desa Rajabasa Baru.
2. Penelitian terdahulu terbatas aspek keberlanjutan proyek infrastruktur desa, termasuk penilaian implikasi lingkungan dan ketahanan masyarakat dari waktu ke waktu, yang dalam penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru.

2.3. Kerangka Berpikir

Desa Rajabasa Baru adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Mataram Baru. Sudah banyak dilakukan pembangunan infrastruktur di Desa Rajabasa Baru, yang mana dalam penelitian ini digunakan rencana pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Rajabasa Baru Tahun 2022. Pembangunan yang dilakukan di Desa Rajabasa Baru beracuan pada dokumen perencanaan pembangunan yang ada pada tingkat kabupaten yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berdasarkan dokumen pembangunan tersebut Desa Rajabasa Baru yang termasuk salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Mataram Baru, diperuntukan sebagai kawasan pengembangan infrastruktur. Adapun pembangunan yang sudah dilakukan di Desa Rajabasa Baru berdasarkan dokumen RKP Tahun 2022 adalah penetrasi jalan desa, pengerasan jalan dengan laston, pembangunan drainase, pembangunan tanggul penahantanah, dan pembangunan jalan telford. Pembangunan infrastruktur tersebut seharusnya membawa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik dampak sosial maupun dampak ekonomi yang dapat meningkatkan interaksi masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah yang ada di desa dan dapat membantu aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi masyarakat.

Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan kondisi sosial dan ekonomi dalam suatu wilayah. Idealnya pertumbuhan sosial dan ekonomi yang pesat dapat dijumpai di wilayah yang infrastrukturnya tersedia dengan baik (World Bank, 1994). Penelitian ini akan melihat dampak pembangunan infrastruktur desa terhadap perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta melihat bagaimana status

keberlanjutan pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Desa Rajabasa Baru.

Hasil yang diharapkan dari sebuah pembangunan infrastruktur adalah memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, meningkatnya interaksi antar masyarakat, kesenjangan antar wilayah dapat teratasi karena akses antar wilayahnya sudah tersedia, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Pada Tabel 5 dibawah ini dijelaskan rincian kutipan variabel yang akan membantu dalam penelitian ini yaitu:

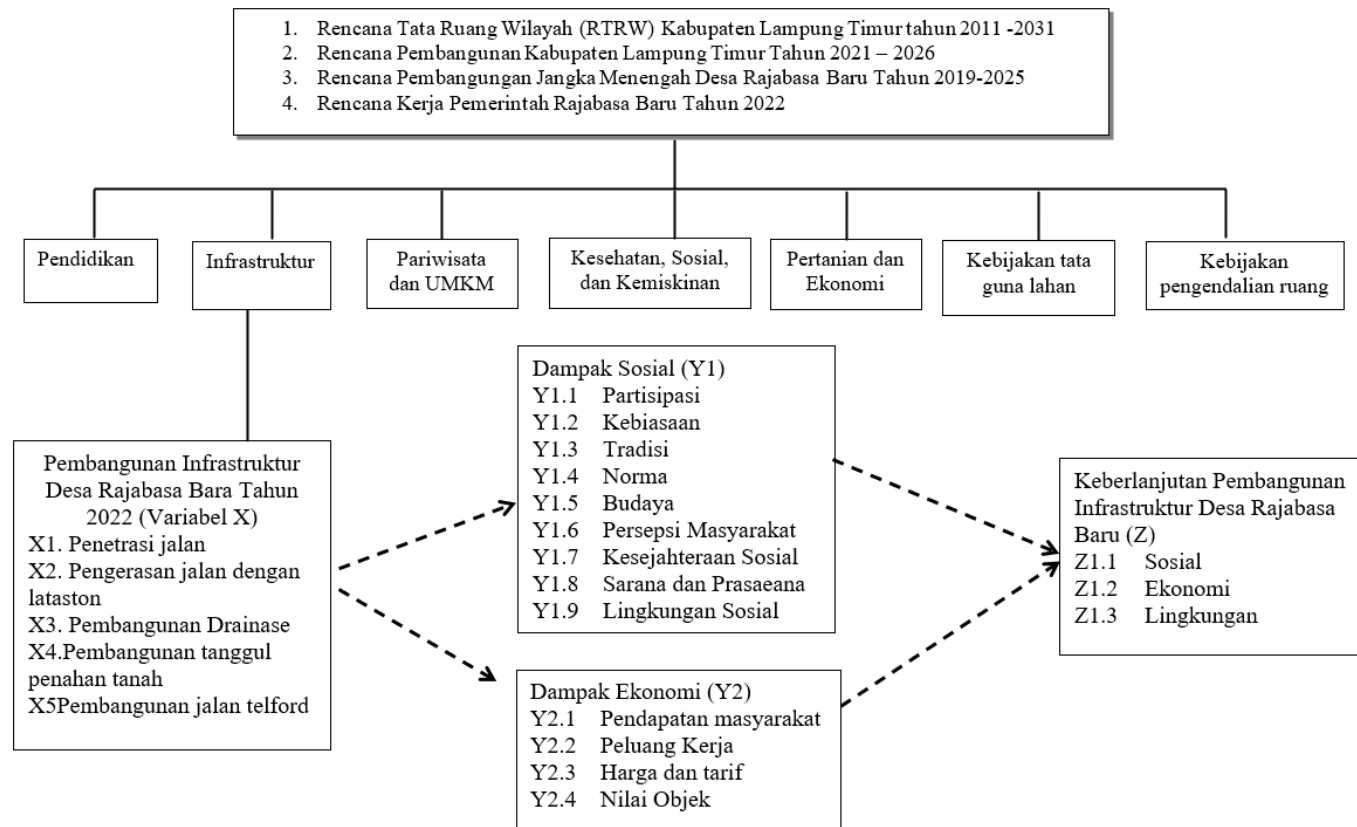
Tabel 5. Kutipan Variabel

Variabel	Kutipan
Variabel Independen (Bebas) Pembangunan Infrastruktur Desa	Rencana Kerja Pendek (RKP) Desa Rajabasa Baru Tahun 2022
Variabel Dependen (Terikat) Dampak Sosial Dampak Ekonomi	Selo Soemardjan (1964) dalam Rastillah (2020) Cohen (1984) dalam Mahfudz (2023)
Variabel Intervening (Penghubung) Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa	Hendrawan dalam Zahra (2024).

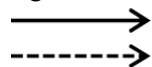
Berdasarkan kutipan variabel yang telah disebutkan di atas maka dapat ditentukan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: variabel independen atau bebas, variabel dependen atau terikat dan variabel intervening atau penghubung. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 adalah: Penetrasi jalan desa, Pengerasan jalan dengan laston, Pembangunan drainase, Pembangunan tanggul penahan tanah, dan pembangunan jalan telford.

Indikator dalam menentukan dampak sosial menurut Selo Soemardjan (1964) dalam Rastillah (2020) meliputi: partisipasi, tradisi, norma, konflik. Penentuan indikator dari variabel dampak ekonomi menurut Cohen (1984) dalam Mahfudz (2023) adalah : pendapatan, peluang kerja, harga dan tarif, dan kepemilikan. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa menurut Hendrawan dalam Zahra (2024) yaitu: sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Variabel Independen yaitu pembangunan infrastruktur desa, dalam penelitian ini berpengaruh langsung terhadap variabel dependen yang dilihat berdasarkan dampak sosial dan dampak ekonomi. Kemudian variabel dependen berpengaruh terhadap variabel intervening atau penghubung, yang mana dalam penelitian ini variabel intervening atau penghubung adalah keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa.



Keterangan :



: Tidak diuji secara statistik

: Diuji secara statistik

Gambar 1. Kerangka berfikir dampak dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa

2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan dan digambarkan di atas, maka dapat diperoleh dugaan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini yaitu:

1. H1: Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) berpengaruh positif terhadap Dampak Sosial (Y1) di desa tersebut.
2. H2: Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) berpengaruh positif terhadap Dampak Ekonomi (Y2) di desa tersebut.
3. H3: Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) berpengaruh positif terhadap Status Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru (Z).
4. H4: Status Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru (Z) memediasi hubungan antara Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) dan Dampak Sosial (Y1).
5. H5: Status Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru (Z) memediasi hubungan antara Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) dan Dampak Ekonomi (Y2).

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Konsep Dasar dan Batasan Operasional

3.1.1. Variabel Independen (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang menurut peneliti akan mempengaruhi variabel dependen (terikat) dalam suatu eksperimen (Hardani, 2020). Adapun dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah partisipasi. Definisi variabel dan indikator variabel Independen (X) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Definisi Variabel Independen dan Indikator Variabel X

Variabel (X)	Definisi Operasional
Penetrasi Jalan (X1)	Lapis perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan di atasnya dan dipadatkan lapis demi lapis. Di atas <i>lapen</i> ini biasanya diberi laburan aspal dengan agregat penutup. Tebal lapisan bervariasi dari 4-10 cm.
Pengerasan jalan dengan <i>Laktaston</i> (X2)	Konstruksi perkerasan lentur (<i>flexible pavement</i>) adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebabkan beban lalu lintas tanah dasar. Suatu struktur perkerasan lentur biasanya terdiri atas beberapa lapisan bahan, dimana setiap lapisan akan menerima beban dari lapisan di atasnya, meneruskan dan menyebarkan beban tersebut ke lapisan di bawahnya.
Pembangunan Drainase (X3)	Drainase adalah sistem yang dibuat untuk mengendalikan air (limpasan) permukaan akibat air hujan. Tujuan dari perencanaan sistem drainase jalan adalah untuk memelihara konstruksi jalan dari kerusakan akibat genangan air hujan dalam waktu yang cukup lama. Genangan air di atas permukaan jalan ini harus segera dibuang melalui saluran drainase jalan (Direktorat Jenderal Bina Marga).

Tabel 6. Lanjutan

Variabel (X)	Definisi Operasional
Pembangunan tanggul penahan tanah (X4)	Pengertian Tembok Penahan Tanah (TPT) menurut Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Jenis konstruksi antara lain pasangan batu dengan mortar, pasangan batu kosong, beton, kayu dan sebagainya. Dengan kata lain merupakan pasangan batu yang dilekatkan dengan campuran semen, pasir dan air untuk melindungi tebing dari keruntuhan tanahnya.
Pembangunan jalan telford (X5)	Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2016 tentang Pedoman Perencanaan Pelaksanaan Perkerasan Jalan Telford, telford merupakan lapis perkerasan yang terdiri dari susunan batu pokok yang berupa batu pecah atau batu bulat yang disusun berdiri, bagian tepinya dibatasi dengan batu tepi, dan diatasnya dihampar batu pecah yang lebih kecil mengisi rongga di antara bagian atas batu pokok, kemudian dipadatkan/digilas dengan alat pemadat sehingga rata.

3.1.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dalam eksperimen dianggap akan dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan kata lain, variabel terikat adalah hasil atau output yang ingin diamati dan ingin memahami bagaimana pengaruh variabel-variabel lain terhadapnya (Hardani, 2020). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2020). Adapun dalam penelitian ini terdapat dua variabel dependen (Y) yaitu dampak sosial (Y1). dan dampak ekonomi (Y2). Berikut definisi variabel dan indikator variabel dependen (Y).

Tabel 7. Definisi Variabel Dependen dan Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Kode
1	Dampak Sosial (Y1) (Selo dalam Rastillah (2020))	Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika dan struktur sosial masyarakat Desa Rajabasa Baru sebagai akibat langsung dari pembangunan infrastruktur.	Partisipasi	Y1.1
			Kebiasaan	Y1.2
			Tradisi	Y1.3
			Norma	Y1.4
			Budaya	Y1.5
			Persepsi masyarakat	Y1.6
2	Dampak Ekonomi (Y2) (Cohen dalam Mahfudz (2023))	Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat Desa Rajabasa Baru sebagai hasil dari pembangunan infrastruktur	Pendapatan	Y2.1
			Peluang kerja	Y2.2
			Harga dan Tarif	Y2.3
			Kepemilikan	Y2.4

Sumber: Data Diolah, 2024

3.1.3. Variabel Intervening (Penghubung)

Hardani (2020) menjelaskan bahwa variabel penghubung adalah variabel yang menjadi antara atau penyalang di antara hubungan variabel bebas dan takbebas. Menurut Sugiyono (2020) variabel penghubung adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening (Z) adalah keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa. Berikut adalah definisi variabel dan indikator variabel.

Tabel 8. Definisi Variabel Intervening dan Indikator Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Kode
Status Keberlanjutan Pembangunan infrastruktur desa (Z) (Hendrawan dalam Zahra (2024))	Kondisi yang menggambarkan kemampuan hasil pembangunan infrastruktur untuk terus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Rajabasa Baru	Sosial	Z1
		Ekonomi	Z2
		Lingkungan	Z3

3.2. Metode Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Sumber Data

Dalam penelitian kuantitatif, informasi dapat dikumpulkan dari sumber data primer. Data primer merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya dengan melakukan proses pengukuran, penghitungan, atau menggunakan alat seperti kuesioner, observasi, wawancara, dan sejenisnya (Hardani et al, 2022). Dalam konteks penelitian ini, sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung (Observasi), dan distribusi kuesioner kepada warga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penelitian ini selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder sebagai rujukan untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2020) Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang berasal dari dokumen.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra BAPPEDA) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Rencana Kerja Jangka Menengah Desa Rajabasa Baru (RPJMDes) Tahun 2019-2025, Rencana Kerja Jangka Pendek Desa Rajabasa Baru (RKPDDes) Tahun 2022 yang ada di Desa Rajabasa Baru.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan data (Sugiyono 2020). Secara metode, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau kombinasi dari ketiganya, yang dikenal sebagai triangulasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi, di mana berbagai teknik pengumpulan data diterapkan dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan kuesioner sebagai teknik utama.

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan serangkaian pertanyaan yang dijawab oleh responden. Penulis menyusun daftar pertanyaan tentang masalah penelitian dan mendistribusikannya kepada responden. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, di mana kemungkinan jawaban telah disediakan. Penggunaan kuesioner tertutup membantu responden menjawab dengan cepat, menghemat waktu penelitian, dan memfasilitasi analisis data serta tabulasi hasil dari semua kuesioner yang terkumpul. Peneliti menggunakan kuesioner untuk memperoleh data terkait pemikiran, perasaan, sikap, perilaku, dan persepsi dari responden. Penyebaran kuesioner menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden.

3.2.3. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2020) Skala pengukuran merujuk pada kesepakatan yang digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan interval yang panjang atau pendek dalam sebuah alat pengukur. Skala pengukuran yang digunakan adalah data ordinal dengan menggunakan simatik diferensial. Semantik diferensial adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur persepsi atau penilaian seseorang terhadap objek atau fenomena berdasarkan dua kata yang berlawanan. Responden diminta untuk memberikan penilaian pada suatu titik di antara kedua kata berlawanan tersebut. Skala ini sering digunakan untuk mengukur sikap, perasaan, atau opini seseorang terhadap objek atau fenomena tertentu dengan memberikan dua kata yang saling bertolak belakang di ujung skala (Sugiyono 2020). Berikut adalah kriteria penentuan jawaban responden.

Tabel 9. Kriteria Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu/ Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono, 2013

3.2.4. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Penentuan lokasi penelitian secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa di Desa Rajabasa Baru telah melakukan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan RKP Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 dengan acuan pada RPJM Desa Rajabasa Baru Tahun 2019-2023 dan pedoman dokumen perencanaan tingkat daerah yaitu RTRW, RPJMD, dan Renstra Bappeda Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

3.3. Teknik Sampling, Populasi, Responden

3.3.1. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah metode atau cara yang digunakan untuk menentukan bagian dari populasi yang akan dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan *non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai responden. Menurut Sugiyono (2020), *non-probability sampling* dipilih ketika peneliti memiliki pertimbangan tertentu terhadap elemen populasi yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel ditetapkan menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua anggota populasi memiliki keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, yaitu dampak pembangunan infrastruktur desa. Oleh karena itu, pemilihan responden difokuskan pada masyarakat yang merasakan, menggunakan, dan terlibat secara langsung dengan infrastruktur yang telah dibangun. Penggunaan teknik *purposive sampling* membantu peneliti menghemat waktu dan sumber daya, karena hanya individu yang memenuhi kriteria relevan yang dijadikan responden. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Rajabasa Baru yang berjumlah 2.455 jiwa. Dari populasi tersebut, peneliti mengambil sampel berdasarkan keterlibatan dan pengalaman langsung masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa, sehingga sampel yang diperoleh dianggap mampu merepresentasikan fenomena yang diteliti.

3.3.2. Sampel

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian atau wakil dari anggota populasi. Dengan memilih teknik pengambilan sampel yang tepat dan jumlah sampel yang memadai, dapat dipastikan bahwa sampel penelitian akan mencerminkan populasi dengan baik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dusun-dusun tertentu yang ada di Desa Rajabasa Baru yang terdapat pembangunan infrastruktur dalam program pembangunan infrastruktur desa berdasarkan RKPDes tahun 2022 seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Jumlah penduduk berdasarkan dusun

No	Dusun	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Dusun I	641
2	Dusun II	668
3	Dusun IV	587
4	Dusun VII	569
Total		2.455

Sumber: Profil Desa Rajabasa Baru (2022)

3.3.3. Responden

Responden adalah individu yang memberikan tanggapan atau informasi mengenai data penelitian (Sugiyono 2020). Penelitian ini menggunakan informasi yang diberikan oleh responden, yaitu masyarakat Desa Rajabasa Baru yang ada di Dusun I, II, IV dan VII tempat lokasi pembangunan infrastruktur berdasarkan RKPDes Tahun 2022. Jumlah minimal responden dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus *Slovin* dengan jumlah populasi sebanyak 2.455 yang tersebar di 4 dusun, dan tingkat kesalahan 10% digunakan karena menurut Isaac dan Michael jika jumlah populasi yang digunakan oleh peneliti cukup banyak, dapat menggunakan tingkatkesalahan 10% sehingga peneliti dapat menghemat sumber dana, waktu dan tenaga yang dinyatakan dalam rumus berikut.

Tabel 11. Jumlah Responden

Desa	Dusun	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
Rajabasa Baru	1	641	25
	2	668	27
	4	587	24
	7	569	22
Total		2.455	98

Sumber: Data diolah, 2024

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin* untuk memudahkan dalam menentukan jumlah sampel karena populasi yang besar.

Rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{2455}{1 + 2455(0,10)^2} = 98$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi (2.455)

e = Batas toleransi kesalahan (10% = 0,10)

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan sampel yang diambil sebanyak 98 orang masyarakat yang berada di dusun lokasi pembangunan infrastruktur berada.

Kemudian dari jumlah sampel tersebut, untuk menentukan alokasi proporsi sampel untuk masing-masing dusun dengan rumus sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan :

Ni : Jumlah sampel menurut kelompok

Ni : Jumlah populasi menurut kelompok

n : Jumlah sampel seluruhnya

N : Jumlah populasi seluruhnya

Kriteria dalam penentuan sampel dipilih dengan pertimbangan peneliti terhadap kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh responden, adapun kriteria tersebut yaitu:

1. Warga Desa Rajabasa Baru yang telah tinggal di desa tersebut minimal 3 tahun, untuk memastikan responden memiliki pengalaman dan pengetahuan

yang cukup tentang kondisi desa sebelum dan sesudah pembangunan infrastruktur.

2. Warga yang berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun, dengan asumsi masyarakat tersebut telah memahami hal yang baik dan buruk dalam memberikan persepsi terhadap dampak suatu pembangunan infrastruktur.
3. Responden harus mewakili berbagai kelompok dalam masyarakat
4. Responden harus memiliki pengetahuan dasar tentang pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di desa, yang akan diverifikasi melalui pertanyaan penyaring sebelum wawancara atau pengisian kuesioner.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam mencari dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara, serta sumber lainnya. Tujuan dari analisis data adalah memperdalam pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan yang bermanfaat bagi orang lain. Teknik analisis data ini mengacu pada proses perhitungan yang bertujuan menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian (Sugiyono 2020). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan aplikasi SmartPLS versi 3.0. SEM merupakan metode analisis statistik multivariat yang menggabungkan model pengukuran dan model struktural. Keputusan menggunakan SmartPLS didasarkan pada kemampuannya untuk menguji model SEM formatif dan reflektif dengan skala pengukuran indikator yang berbeda dalam satu model. Model Pengukuran (*Outer Model*) merupakan pengukuran reflektif dinilai menggunakan reliabilitas dan validitas. Model Struktural (*Inner Model*) merupakan model struktural menghubungkan variabel laten satu sama lain. Dalam penelitian ini, pendekatan *Partial Least Square* (PLS) digunakan untuk menguji model SEM dengan berbagai bentuk skala, termasuk rasio kategori, skala *Likert*, dan lainnya.

3.4.2. Model Pengukuran (*Outer Model*)

Analisis *outer model* digunakan untuk menguraikan hubungan antar variabel laten (konstruk) dengan indikator penyusunnya. Pada uji *outer model* terdapat empat kriteria yang harus diuji yaitu:

1. *Convergent Validity*

Menunjukkan sejauh mana indikator mewakili variabel laten. Kriteria penentu suatu indikator dikatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* $> 0,7$ dan $AVE > 0,5$

2. *Discriminant Validity*

Memastikan bahwa indikator yang digunakan tidak bersifat unidimensional dan memiliki validitas diskriminan yang memadai. Kriterianya yaitu *Cross loading* dimana dalam analisis faktor mengacu pada hubungan antara indikator-indikator dari satu konstruk dengan konstruk lain.

3. *Composite Reliability*

Merupakan ukuran konsistensi internal dalam skala atau konstruk. Mengukur sejauh mana indikator-indikator dalam skala konsisten mengukur konstruk yang sama. Kriterianya harus memiliki nilai $> 0,7$ sehingga dapat dikatakan reliabel.

1. Analisis *Varian* Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menggambarkan sejauh mana model struktural mampu menjelaskan variasi dari konstruk endogen. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0.05) Analisis varians dilakukan dengan memperhatikan nilai R-Square.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis, kita melihat nilai *T-Statistic* dan *P-Values* pada uji *Path Coefficient*. Ketentuannya nilai *P-Values* yang untuk nilai signifikansi 5% adalah $< 0,05$ Sedangkan untuk nilai T- pada alpha 39,5% adalah 1,96. (Dr. Duryadi, 2021).

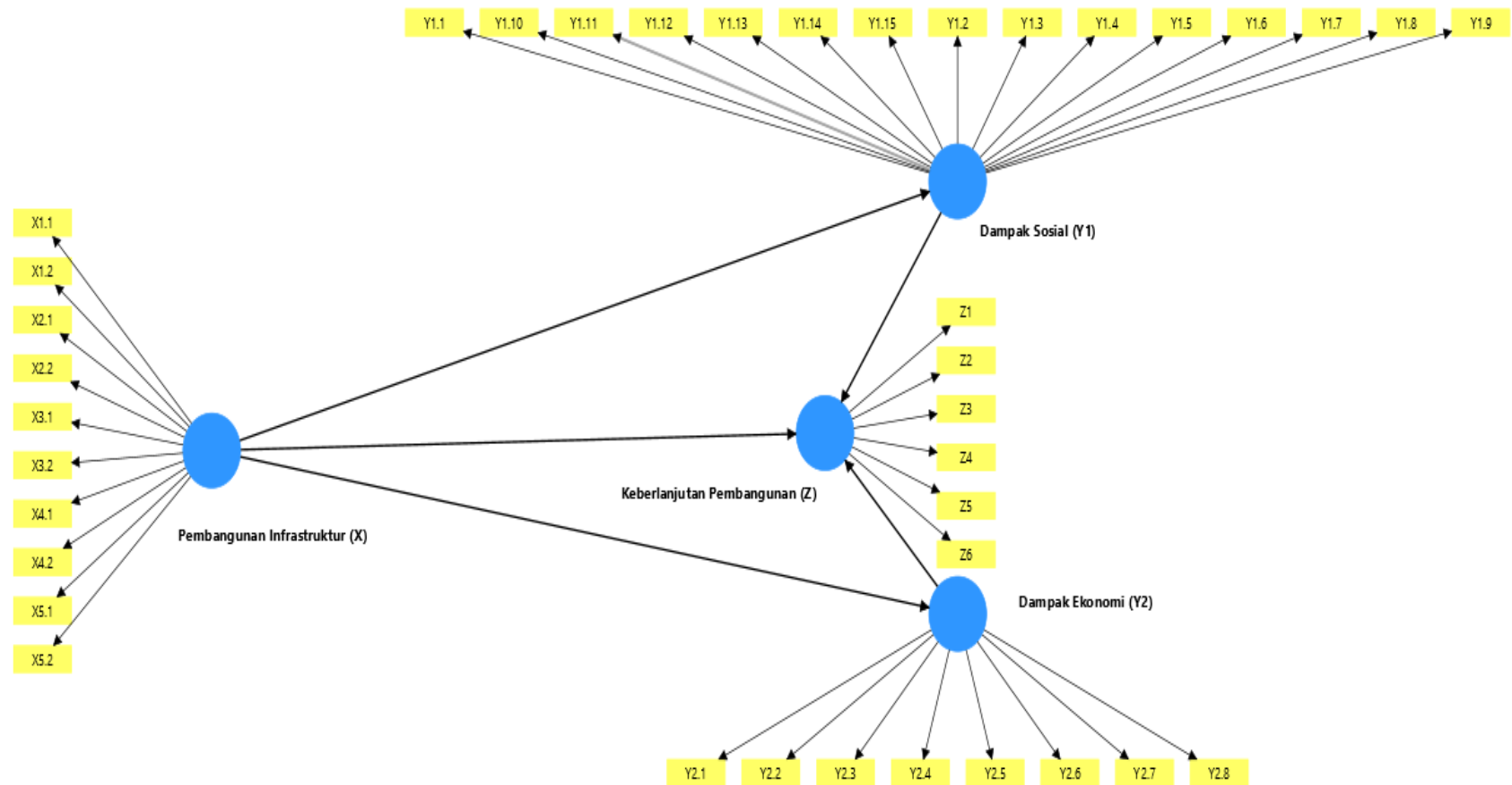
3.4.3. Struktural Model (*Inner Model*)

Analisis inner model adalah proses evaluasi yang menggunakan metode *bootstrapping* untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten hubungan yang signifikan antara konstruk dapat dilihat dari nilai koefisien jalur (*path*

coefficient) yang lebih besar dari 0,1 (Sugiyono 2020). Analisis *inner model* terdiri dari:

3.4.4. Model Diagram Jalur

Adapun dalam penelitian ini untuk menguji hubungan variabel dependen, variabel independen menggunakan SmartPLS Versi 3.0. SmartPLS 3 memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya alat yang efektif untuk penelitian. Pertama, kemampuan *software* ini dalam menangani model kompleks dengan banyak variabel dan hubungan antar variabel sangat membantu peneliti dalam menganalisis data yang rumit. Selain itu, SmartPLS 3 menawarkan fleksibilitas dalam ukuran sampel, sehingga dapat digunakan bahkan dengan sampel yang relatif kecil, yang sangat sesuai dengan kondisi penelitian di tingkat desa. Keunggulan lain adalah metode PLS yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal, sebuah tantangan umum dalam penelitian sosial. Di samping itu, SmartPLS 3 juga mampu menganalisis variabel laten, yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, yang sering muncul dalam studi dampak sosial dan ekonomi. Dengan konstruksi diagram jalur. Berikut gambar diagram jalur antar variabel pada penelitian ini:



Gambar 2. Model diagram jalur antar variabel

Berdasarkan model diagram jalur antar variabel di atas, maka dapat ditentukan pengaruh langsung (*direct effect*) yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) berpengaruh positif terhadap Dampak Sosial (Y1) di desa tersebut.
2. Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) berpengaruh positif terhadap Dampak Ekonomi (Y2) di desa tersebut.
3. Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) berpengaruh positif terhadap Status Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru (Z).
4. Status Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru (Z) memediasi hubungan antara Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) dan Dampak Sosial (Y1).
5. Status Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru (Z) memediasi hubungan antara Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022 (X) dan Dampak Ekonomi (Y2).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan Mataram Baru merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur yang berpenduduk 22.068 jiwa dengan luas wilayah 79,56 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

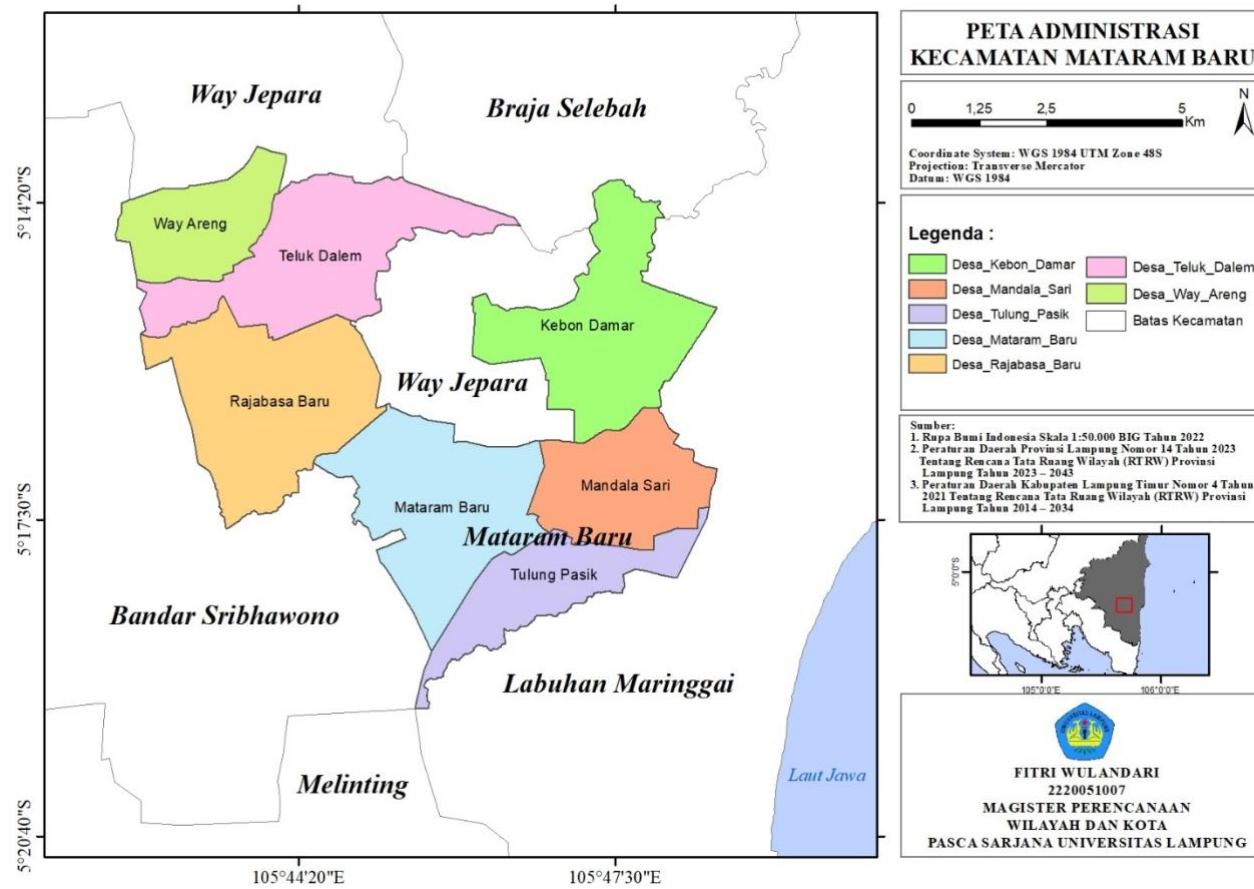
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Jepara dan Kecamatan Braja Selehah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Bandar Sribhawono.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Maringgai.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sribhawono.

Ibukota Kecamatan Mataram Baru berkeududukan di desa Mataram Baru.

Wilayah Kecamatan Mataram Baru meliputi 7 (tujuh) desa yaitu :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Mataram Baru | 5. Rajabasa Baru |
| 2. Tulung Pasik | 6. Teluk Dalem |
| 3. Mandala Sari | 7. Way Areng |
| 4. Kebon Damar | |

Peta Administrasi Kecamatan Mataram Baru dapat dilihat Pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta administrasi Kecamatan Mataram Baru

4.2. Gambaran Umum Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur

Rajabasa Baru adalah sebuah desa di Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa Rajabasa Baru merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, jarak kantor desa menuju pusat kota kecamatan sebesar 7 Km, sedangkan jarak menuju ibukota kabupaten sejauh 60 Km. Jumlah disini di Desa Rajabasa Baru sebanyak 7 dusun dan 29 RT. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup mendukung dalam pembangunan wilayah, baik di sektor pertanian, peternakan, maupun ekonomi kreatif masyarakat. Secara geografis, Desa Rajabasa Baru berada pada dataran rendah dengan kondisi alam yang cukup subur. Wilayah desa ini didominasi oleh lahan pertanian, khususnya untuk komoditas seperti padi, jagung, singkong, dan palawija lainnya. Selain itu, beberapa warga juga mengembangkan usaha peternakan skala rumah tangga seperti ternak ayam, kambing, dan sapi.

Berdasarkan data terakhir dari pemerintah desa, jumlah penduduk Desa Rajabasa Baru mencapai sekitar 2.455 jiwa, yang tersebar dalam beberapa dusun terdiri dari 1.131 rumah tangga, 1.328 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 1.127 jiwa berjenis kelamin perempuan. Struktur sosial masyarakatnya bersifat agraris, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani, serta pedagang kecil. Aset yang dimiliki dari Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur mencakup kepemilikan tanah seluas 16.587 ha. Aset tanah ini dalam kondisi tanah sawah, kebun, dan lapangan bola. Adapun jumlah kendaraan yang dimiliki Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur sebanyak 35 kendaraan, terdiri dari 7 mobil baik mobil dinas dan juga ambulan desa. Sedangkan 28 kendaraan sisanya adalah motor dinas.

Jumlah sarana perekonomian sebanyak 30 bangunan toko/kios dan 2 bangunan rumah makan, Jumlah sarana pendidikan di Desa Rajabasa Baru sebanyak 2 taman kanak – kanan (TK), 3 sekolah dasar (SD), dan 2 sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan sarana ibadan di Desa Rajabasa Baru terdapat 8 buah masjid, 9 buah langgar, 1 buah gereja dan 1 buah vihara. Sedangkan sarana pelayanan keluarga sebanyak 5 buah posyandu.

Adapun organisasi yang tersedia di Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa: Struktur inti pemerintahan desa.
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Lembaga legislatif desa yang berfungsi mengawasi dan menyetujui kebijakan desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM): Fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga): Organisasi pemberdayaan perempuan.
 - c. Karang Taruna: Organisasi kepemudaan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda.
3. Kelompok-Kelompok Masyarakat
 - a. Kelompok Tani/Nelayan: Organisasi untuk mendukung kesejahteraan petani dan nelayan.
 - b. Kelompok Pengajian: Untuk kegiatan keagamaan.
 - c. Kelompok Usaha Mikro: Mendukung ekonomi desa melalui UMKM.
4. Organisasi Keagamaan
 - a. Majelis Taklim: Untuk pendidikan agama Islam.
 - b. Remaja Masjid: Aktivitas remaja di masjid.
 - c. Organisasi Keagamaan Lain: Tergantung pada agama mayoritas masyarakat desa.
5. Lembaga Adat Desa, Berfungsi melestarikan adat dan budaya

setempat.

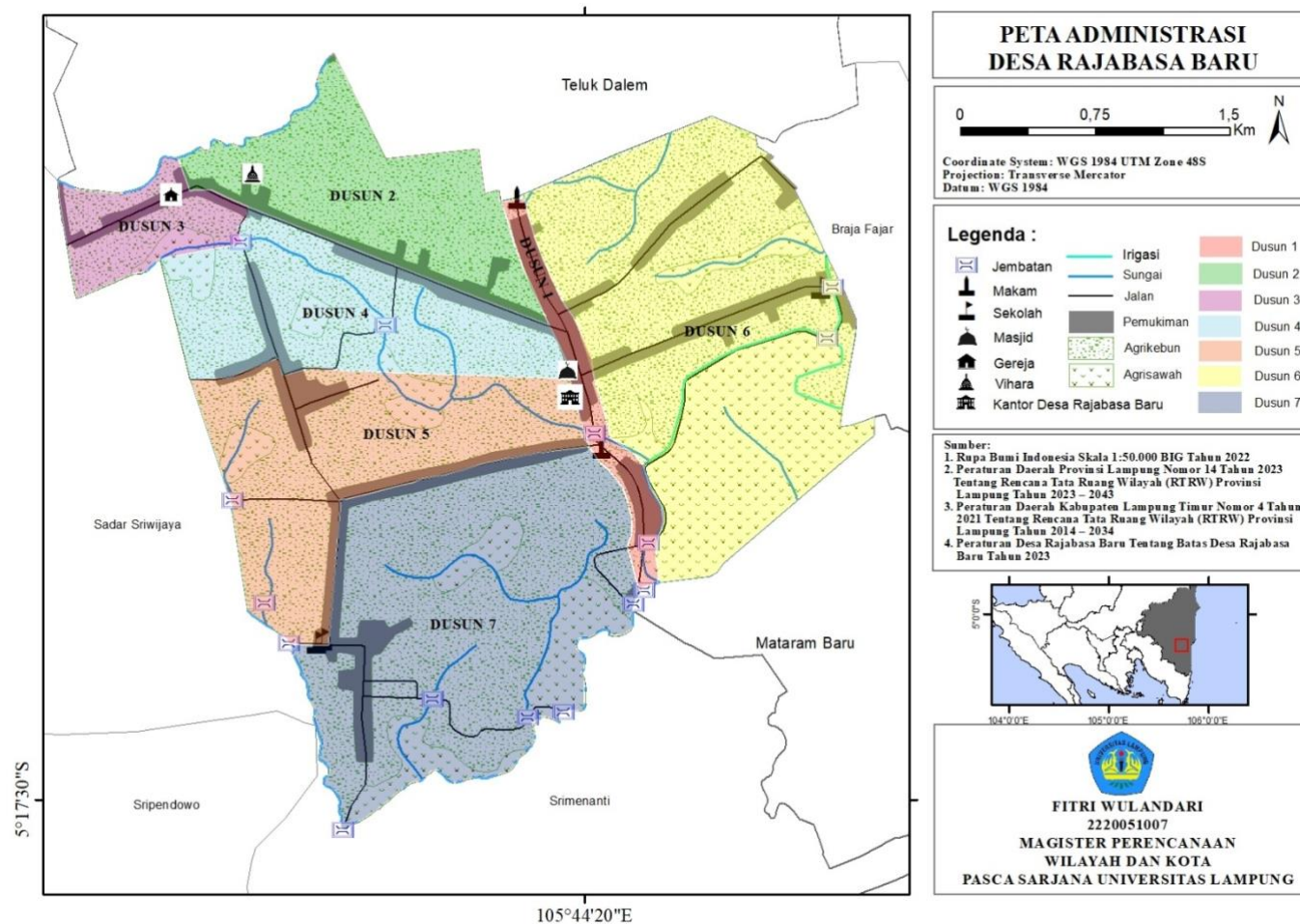
6. Organisasi Sosial

- a. Posyandu: Mendukung kesehatan ibu dan anak.
- b. Kelompok Arisan: Organisasi sosial berbasis keuangan.

7. Organisasi Pendidikan

Komite Sekolah: Mendukung kegiatan sekolah di desa.

Preferensi infrastruktur yang dibutuhkan desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur yaitu infrastruktur jalan, saluran irigasi, drainase, dan jaringan telekomunikasi. Jenis Pembangunan Infrastruktur Desa Rajabasa Baru Tahun 2022. Mencakup Penetrasi jalan desa, Penetrasi jalan desa Pengerasan jalan dengan lataston, Pembangunan drainase, Pembangunan tanggul penahan Tanah, Pembangunan jalan telford. Adapun infrastruktur jalan tersebut seluas 7000 M dan mencakup 4 dusun. Peta administrasi Desa Rajabasa Baru Kecamatan Mataram Baru dapat pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Administrasi Desa Rajabasa Baru

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur desa memberikan dampak sosial yang cukup baik. Hasil kuesioner menunjukkan 9,18% responden menilai dampak sosial hanya cukup, dan 9,18% lainnya merasa hasil pembangunan belum optimal. Beberapa warga di dusun pinggiran belum sepenuhnya merasakan manfaatnya, serta muncul kekhawatiran terhadap perubahan nilai-nilai lokal akibat akses luar yang semakin terbuka. Meski demikian, secara umum pembangunan infrastruktur telah meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, serta memperkuat interaksi dan partisipasi sosial masyarakat.
2. Infrastruktur desa berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar jalan baru mengalami penurunan biaya transportasi hingga 30%, sehingga keuntungan usaha pertanian dan perdagangan kecil meningkat. Kegiatan pembangunan juga membuka lapangan kerja sementara bagi pemuda desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak ekonomi nyata dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa (X) berpengaruh langsung terhadap dampak sosial (Y1) dengan nilai t-statistic 7.948, p-value 0.000, dan koefisien 0.564. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan sosial di masyarakat. Pengaruh terhadap dampak ekonomi (Y2) tidak signifikan dengan nilai t-statistic 0.934, p-value 0.350, dan koefisien 0.093. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur

belum dirasakan secara langsung karena pelaksanaan pembangunan masih baru dan aktivitas ekonomi belum berkembang optimal. Dampak ekonomi (Y2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan (Z) dengan nilai t-statistic 9.221, p-value 0.000, dan koefisien 0.592. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan lebih kuat apabila manfaat ekonomi dari infrastruktur benar-benar dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Hasil uji pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa jalur pembangunan infrastruktur (X) terhadap keberlanjutan (Z) melalui dampak sosial (Y1) tidak signifikan, dengan nilai t-statistic 0.413, p-value 0.680, dan koefisien 0.042. Nilai ini menggambarkan bahwa perubahan sosial yang terjadi setelah pembangunan belum cukup kuat untuk mendorong keberlanjutan. Masyarakat sudah merasakan peningkatan interaksi dan akses kegiatan, tetapi keterlibatan dalam pemeliharaan dan tindak lanjut pembangunan masih rendah. Keberlanjutan pembangunan akan lebih kuat apabila masyarakat tidak hanya menggunakan infrastruktur, tetapi juga terlibat dalam menjaga, memperbaiki, dan merencanakan pengembangan berikutnya.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan serta pengembangan pembangunan infrastruktur desa, baik dalam lingkup akademik maupun praktis untuk pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten.

1. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada dampak sosial, ekonomi, dan keberlanjutan. Untuk penelitian mendatang, variabel lain seperti dampak lingkungan dan kualitas pekerjaan konstruksi dapat ditambahkan untuk memahami faktor-faktor yang lebih luas dalam pembangunan infrastruktur.

2. Saran untuk Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten

Saran yang diberikan mencakup peran penting dari berbagai tingkatan pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah desa diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan melibatkan responden secara aktif dalam perencanaan melalui RPJMDes dan RKPDDes, melakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkala, meningkatkan kesadaran warga untuk turut menjaga fasilitas yang telah dibangun, serta menerapkan transparansi dalam penggunaan dana desa. Di tingkat kecamatan, diperlukan koordinasi dan supervisi yang lebih intensif terhadap pelaksanaan proyek desa, pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas manajerial, serta fasilitasi dalam mengakses sumber pendanaan tambahan. Sementara itu, pemerintah kabupaten diharapkan menyusun kebijakan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat dan data partisipatif, menjamin pemerataan pembangunan antar desa, meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi proyek, serta mendorong kerja sama dengan sektor swasta melalui program CSR guna meningkatkan kualitas infrastruktur pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana, L., Salmah, E., Sriningsih, S., & Harsono, I. (2023). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016- 2021. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1-12.
- Amalia, P., Suprayogi, Y., Azis, Y., Hermawan, W., Pamungkas, E., Nurzaman, A., & Priyono, A. F. (2021). Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Journal of Infrastructure Policy and Management (JIPM)*, 4(1), 1-11.
- Aulia, S., Anisa, S. N., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi (JUPEA)*, 4(1).
- Awainah, N., Sulfiana, Nurhaedah, Jamaluddin, & Aminullah, A. (2024). Peran Infrastruktur Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 6847–6854.
- Brawijaya, A. (2018). Optimalisasi Pembangunan Desa melalui Pengelolaan Dana Desa yang Berbasis Keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 23–35.
- Chin, W. W. (2000). Partial Least Squares for Researchers: An Overview and Guidelines. In Marcoulides, G. A. (Ed.), *Modern Methods for Business Research* (pp. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates.
- Claudea, N., Karjaya, L. P., Safitri, R. S., Rahma, Y. M., Muharni, Z., Aulia, N., ... & Fadillah, A. (2024). Dampak Komersialisasi Budaya Terhadap Budaya Asli Di Desa Sade Di Kabupaten Lombok Tengah. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 99-114.
- Coleman, N., Li, X., Comes, T., & Mostafavi, A. (2023). Weaving Equity into Infrastructure Resilience Research and Practice: A Decadal Review and Future Directions.
- Elvandari, D. A., Anwar, S., & Kasogi, M. A. (2025). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 5(1).

- Fadli, A. M., Daulay, A. A., Muhammad, B. M., Mulya, S. A., Juwita, S., & Sakira, T. F. (2025). Menilik Manfaat Ekonomi dan Dampak Sosial Infrastruktur: Studi pada Proyek Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 6(2), 48–64.
- Fatmawati, R., Alwi, S., & Tajuddin, T. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Putemata Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 3(01), 78–88. <https://doi.org/10.62668/jide.v3i01.1123>
- Fatimah, S., Jusniaty, J., Syamsuddin, S., & Mukrimah, M. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah. *Journal of Government Insight*, 2(2), 238-251.
- Fauziah, N. R., & Nasdian, F. T. (2021). Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan pemanfaatan digital pada desa wisata. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(1), 189-201.
- Fitriandari, M., & Winata, H. (2021). Manajemen pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1), 1-13.
- Frita, N., Hamdani, I., & Devi, A. (2022). Pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap infrastruktur nasional dan pertumbuhan ekonomi dalam program SDGs. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 155-182.
- Fuseini, M. N. (2024). Rural infrastructure and livelihoods enhancement: The case of Community-Based Rural Development Program in Ghana. *Heliyon*, 10(13), e33659. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33659>.
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1-15.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV.Pustaka Ilmu Grup: Yogyakarta.
- Harsono, H. (2021). Strategi Pemasaran Keripik Ikan Layur sebagai Pendukung Perekonomian Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo, Gunung Kidul. *Jurnal Atma Inovasia*, 1(1), 66-73.
- Hulu, P. K., & Wahyuni, K. T. (2021, November). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019. In *Seminar Nasional Official Statistics (Vol. 2021, No. 1, pp. 603-612)*.
- Hungu. 2016. *Demografi Kesehatan Indonesia*. Grasindo. Jakarta

- Ismunandar, A. (2020). Dinamika Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Transformasi Sosial Masyarakat. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 205- 219.
- Istiqomah, D. W. N., Utami, T., & Sunesti, Y. (2024). Efektivitas Pengalokasian Dana Desa terhadap Program Percepatan Penurunan Stunting. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 607-623.
- Juarez-Quispe, J., et al. (2025). Advancing Sustainable Infrastructure Management. *Buildings*, 15(2), 210.
- Karim, T. Z., Harahap, H. H., & Mardalena, M. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah Dalam Upaya Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Jambi. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 4(2), 222-240.
- Khanifah, K., Pratiwi, R., & Kholafah, L. (2022). Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa. *Jurnal Abdidas*, 3(6), 979-988.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Kurniawati, Y., & Bahiyyah, K. (2023). Evaluasi Penetapan Tarif Air Minum Pada Blud Air Minum Kota Cimahi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 2620-2628.
- Kustiawan, W., Hasibuan, A. A., Lubis, N., Fayrozi, M. F., & Maisarah, M. (2023). Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Infrastruktur Nasional di Era Digital. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(2), 202-207.
- Laila Hasyim Tambun, Delin Sea, Muhammad Zulfikar, Puti Andiny, & Safuridar Safuridar. (2023). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Akuntansi*, 2(4), 288–301.
<https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i4.1421>
- Laimeheriwa, S. H., & Wargadinata, E. (2020). Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Mantiri, J. (2023). *Buku Ajar Manajemen Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Tahta Media.
- Mawarni, K., Ahmad, I., & Rusliyawati, R. (2023). Sistem Informasi E-Government untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kantor Desa Mekarsari Lampung Barat. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(3), 233-239.
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). Tinjauan Konseptual Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69-78.

- Muslim, M., Muklis, M., Romus, M., Malau, R. H., & Rachmadi, M. (2023). Penguatan Nasionalisme Melalui Aktivitas Ekonomi Di Pulau Terluar Indonesia (Studi Di Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis-Riau). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 20(2), 175-184.
- Mutia Fajri Sirega, Anisah Nasution, Fitri Madinah, Zafira sabrina, & Maulida Umami Zakia. (2022). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 52–62. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.483>
- Naufal, H. A., & Mulyanto, S. (2023). The Effect of Social Infrastructure on Rural Poverty in Indonesia with The Village Development Index As Moderation Variable. *EKO-REGIONAL: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(1), 87–98. <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2023.18.1.3340>
- Parsons, T. (1951). *The social system*. Glencoe, III: Free Press.
- Pangestu, D. T., & Azizah, S. (2022). Dampak Sosial Ekonomi Peternakan Ayam Kampung Berskala Mikro Di Desa Payaman, Nganjuk. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(1), 31-39.
- Puluhulawa, M. R., & Achir, N. (2021). Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan Di Desa Buntulia Tengah. *Das Sein: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 1(2), 89- 99.
- Purwitasri, A., & Mutafarida, B. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656-666.
- Putra, A. A. (2023). Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba Di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 16-22.
- Poluan, K. K., Pangkey, M., & Tampi, G. (2018). *Dampak Pembangunan Infrastruktur Desa Pisa Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara Kartika Karina Poluan Masje Pangkey Gustaaf Tampi. 1.*
- Putri, M. B. (2015). Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga Terhadap Perubahan Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(2), 222. <https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10850>
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>

- Putri, M. B. (2015). Pengaruh Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga Terhadap Perubahan Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk di Sekitarnya. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 11(2), 222.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10850>
- Rahayu, S. (2021). Analisis luas lahan terhadap pendapatan usaha tani padi di kabupaten sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 4(2), 297-303.
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461-1471.
- Rodhi, N. N. (2023). Menentukan Level Risiko Proyek Infrastruktur Perdesaan Di Kabupaten Bojonegoro. *Dearsip: Journal of Architecture and Civil*, 3(02), 67-73.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 39-50.
- Sartika, S., Abbas, B., Supriaddin, N., Nur, M., & Tambunan, R. (2024). Analisis Promosi Pariwisata dan Budaya Masyarakat Lokal dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Syntax Idea*, 6(7), 3164-3180.
- Satria, A. (2023). Analisis Keberlanjutan Lingkungan dalam Pengembangan Sektor Pariwisata: Perspektif Ekonomi Lingkungan di Destinasi Wisata. *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 16-23.
- Seswandi, A., & Bastian, A. (2024). Pengaruh Interpersonal Skill Terhadap Kinerja Dengan Dimediasi Oleh Interaksi Sosial Sesama Rekan Kerja. *Ekomania*, 10(3).
- Sidik, S., Hasrin, A., & Fathimah, S. (2020). analisis dampak kebijakan pembatasan waktu operasional pasar di Kabupaten Minahasa akibat penanggulangan covid-19. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(3).
- Simanjuntak, J. V., Muhammad, F., Al Aqilah, M. R., Raihannah, N. A., & Bakti, H. S. G. P. (2024). Potensi Ibu Kota Nusantara (IKN) Sebagai Katalisator Pemerataan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3), 275-290.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>

- Sita, R., & Agusta, I. (2011). Evaluasi Efektivitas, Relevansi, Dan Keberlanjutan Dampak Proyek Second Water Sanitation for Low Income Communities (Wslic-2). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), 217–230. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.5821>
- Sriwati, E., Setiawati, B., & Tahir, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(1), 104-116.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suja, A., Siregar, A. K., & Alfa, A. (2025). *Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa untuk Mendorong Perekonomian di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa*.
- Tambunan, N. B., Tobing, R. K. L., Sinaga, D., Tarigan, I. S., & Amanda, S. (2023). Analisis Pengaruh Human Capital, Angkatan Kerja, dan Pendidikan Terhadap Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2006- 2022. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 3(2), 16-28.
- Time lags in Environmental Governance: A Critical Review*. (2025). *AMBIO: A Journal of the Human Environment*.
- Tumewu, D. C., Masinambow, V. A., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dan Kapasitas Anggaran Pedesaan Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(4).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Nomor 13th Edition).
- Wantari, W. (2022). Studi Dampak Usaha Penggilingan Batu terhadap Kondisi masyarakat di Desa Watukalangkari Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana. *JIDE: Journal Of International Development Economics*, 1(01), 43-55.
- Wahidin, A. (2022). *Pembangunan Sosial dan Perencanaan Partisipatif: Praktek Pengembangan Masyarakat I*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Widani, N. M. (2022). Pemberdayaan Sentra Produk Lokal Dalam Meningkatkan Pembangunan Bangsa. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Equilibrium*, 8(2), 324-329.
- Widodo, F. (2018). Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Infrastruktur dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 5(2).

- World Bank. (1994). World Development Report 1994: Infrastructure for Development. In *Oxford University Press*.
- Yusliana, E., Anantanyu, S., & Rusdiyana, E. (2020). Kemampuan Petani dalam Melakukan Usahatani Ikan Air Tawar di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Agritexts: Journal of Agricultural Extension*, 44(2), 106-115.
- Zahra, K., Manalu, R. H. R., Nabillah, R., & Dewi, P. K. (2024). Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi kecamatan Medan Tembung. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1857-1866.
- Zulfan, Z., Safwadi, I., Yuliana, Y., Ibrahim, L. T., & Astini, D. (2022). Analisis Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Aceh Besar. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 6(1), 79-88.
- Zam, M. Z. (2025). *Dampak Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Pedesaan The Impact of Infrastructure Development Policy on Poverty Reduction in Rural Areas*. 8(1), 285–299. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6707>